

**PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIA
COMPLIANCE*) DALAM JUAL BELI PERUMAHAN
MULTAZAM ISLAMIC RESIDENCE, KALANG ANYAR,
SIDOARJO**

SKRIPSI

OLEH:

NUR KHOLIFAH

NIM. C74212123



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Kholifah
NIM : C74212123
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Kepatuhan Syariah (*Sharia
Compliance*) dalam Jual Beli
Perumahan Multazam Islamic
Residence, Kalang Anyar, Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2016

Saya yang menyatakan,



Nur Kholifah

NIM. C74212123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Kholifah NIM. C74212123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2016

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fatikul Himami', written in a cursive style.

Fatikul Himami, M.EI

NIP. 198009232009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Kholifah NIM. C74212123 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Fatikul Himami, MEI
NIP.198009232009122001

Penguji II,



Dr. H. M. Shodiq, S.Ag, M.Si
NIP.197504232005011002

Penguji III,



Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

Penguji IV,



Aris Fanani, M.Kom
NIP. 198701272014031002

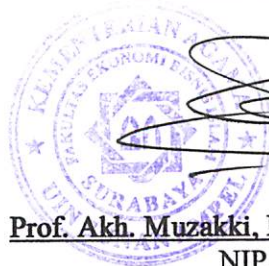
Surabaya, 12 Agustus 2016

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinshy.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR KHOLIFAH
NIM : C742121123
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nurkholifah726@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE)
DALAM JUAL BELI PERUMAHAN MULTAZAM ISLAMIC RESIDENCE,
KALANG ANYAR, SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2016

Penulis

(Nur Kholifah)
nama terang dan tanda tangan

dalam bidang jasa, antara lain lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah (*tak ful*), pegadaian syariah (*rahn*), pasar modal syariah, reksadana syariah, baitul maal wattamwil dan koperasi, lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf). Selain lembaga keuangan, perusahaan yang bergerak dalam bidang produk dan jasa juga sudah banyak yang menggunakan label syariah sebagai identitas perusahaannya, seperti, salon syariah, hotel syariah, pasar syariah, laundry syariah, khususnya perumahan syariah.

PT. Cahaya Mentari Pratama merupakan salah satu pengembang perumahan dengan tiga macam konsep, salah satunya adalah Perumahan Multazam Islamic Residence yang memiliki konsep islami artinya dari segi arsitektur bangunannya yang didesain dengan konsep islami. Maksudnya, dari segi ornamen pintunya seperti ornamen pintu pada masjid pada umumnya, ornamen seperti itu terdapat di sebagian tipe rumah, ada ruangan khusus di teras rumah yang digunakan sebagai ruang tamu, dan tangga yang menuju ke lantai dua terletak di luar rumah. Pengguna perumahan ini dikhususkan bagi orang-orang muslim saja.¹ Sistem pembayarannya langsung melalui *developer* (*in house*) dengan menggunakan akad *Ijrah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) dan *ujrah* sebagai keuntungannya serta bebas riba.

Sistem perumahan syariah sudah menjadi keputusan para ulama fiqh sejak tahun 1990. Berikut kutipan Keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (di

¹ Dani Ari Setiawan (Karyawan, *Marketing* PT. Cahaya Mentari Pratama), *Wawancara*, Marketing Gallery PT. Cahaya Mentari Pratama, Jl. Rungkut Asri Timur VII No. 21/RK IV-D1 Surabaya, 14 November 2015, Jam 13.00 WIB.

Syariah Dharmawangsa Surabaya meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan pembiayaan, transaksi perpanjangan pembiayaan, dan transaksi penjualan barang agunan. Pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Surabaya Dharmawangsa telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang implementasi kepatuhan syariah produk gadai emas di BNI Syariah Surabaya Cabang Dharmawangsa, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kepatuhan syariah dalam strategi penjualan dan akad jual beli yang digunakan dalam transaksi jual beli Perumahan Multazam Islamic Residence.

Karya Budi Sukardi yang berjudul “Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sebagai alat pencegahan kemungkinan resiko dan fraud di sektor riil. Begitu juga inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (*shariah standards*) dan *shariah governance*, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas SDM perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen. Ini diterapkan untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Islam mampu dan eksis dalam persaingan bisnis, perdagangan di era globalisasi modern serta menjaga keberlangsungan usaha (*sustainability*) perbankan Islam di Indonesia.

¹⁰ Budi Sukardi, “Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia”, dalam Jurnal Akademika, 2012 dalam <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/akademika/article/view/61.html> diakses pada 03 November 2015.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sebagai alat pencegahan kemungkinan resiko dan fraud di sektor riil, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kepatuhan syariah dalam strategi penjualan dan akad jual beli yang digunakan dalam transaksi jual beli Perumahan Multazam Islamic Residence.

Karya Khotibul Umam yang berjudul “Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”.¹¹ Penelitian ini membahas tentang menurut UU 21/2008, Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib memisahkan unitnya apabila nilai aset unit tersebut telah mencapai 50% dari total aset bank induk. Kewajiban tersebut ditujukan untuk menjadikannya sebagai Bank Umum Syariah yang terpisah pengelolaannya dari Bank Umum Konvensional, sehingga diharapkan lebih taat terhadap prinsip syariah.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib memisahkan unitnya apabila nilai aset unit tersebut telah mencapai 50% dari total aset bank induk agar Bank Umum Syariah lebih taat terhadap prinsip syariah, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kepatuhan syariah dalam strategi penjualan dan akad jual

¹¹ Khotibul Umam, “Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”, Jurnal Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 22 (2010) dalam <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/281/136.html>, diakses pada 26 Nopember 2015.

atau keterangan dari 3 *marketer* dan 1 admin Perumahan Multazam Islamic Residence, yaitu:

1. Dani Ari Setiawan (*marketer*) karena beliau memiliki banyak informasi tentang strategi penjualan dan transaksi jual beli Perumahan Multazam Islamic Residence, namun tidak banyak waktu yang diberikan untuk wawancara.
2. Agil Prastiaji (*marketer*) karena beliau memiliki banyak informasi tentang strategi penjualan dan transaksi jual beli Perumahan Multazam Islamic Residence dan *marketer* yang bersedia meluangkan banyak waktunya untuk diwawancarai.
3. Zandy Rizky Abadi (*marketing manager*) karena beliau merupakan pimpinan dari unit pemasaran yang mana lebih menguasai tentang strategi penjualan dan transaksi jual beli Perumahan Multazam Islamic Residence.
4. Nanik Rahmawati (admin) yang merupakan penerima awal pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti karena *marketer* belum bersedia diwawancarai karena sedang *launching* perumahan baru PT. Cahaya Mentari Pratama. Hasil wawancara yang diperoleh yaitu latar belakang Perumahan Multazam Islamic Residence.

Pada sumber primer ini, peneliti juga berkeinginan melakukan wawancara dengan *developer* Perumahan Multazam Islamic Residence namun beliau tidak memiliki waktu luang untuk

wawancara dan wawancara dengan pembeli Perumahan Multazam Islamic Residence untuk memperkuat informasi yang diberikan oleh *marketer* dalam hal strategi penjualan dan transaksi jual beli Perumahan Multazam Islamic Residence. Namun, peneliti tidak diizinkan oleh pihak PT. Cahaya Mentari Pratama karena untuk melindungi privasi dari pembeli. Dari keempat narasumber di atas, data yang diberikan sudah konsisten dan tidak ada yang berbeda.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber ini berupa literatur yang berkaitan dengan strategi penjualan dan transaksi jual-beli, antara lain:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Ijrah Muntahiyah Bittamlik*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang *Istin'ah*.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Buku Fiqh Muamalah
5. Buku Syariah *Marketing*
6. Buku Perbankan Syariah
7. Website Multazam Islamic Residence

data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang memuat tentang teori strategi penjualan menurut pemasaran perspektif Islam dan teori akad jual beli dalam Islam.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang Perumahan Multazam Islamic Residence, deskripsi tentang strategi penjualan Perumahan Multazam Islamic Residence dan transaksi jual beli yang dilakukan *developer* dengan konsumen.

Bab keempat adalah analisis masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian skripsi. Adapun bab ini meliputi strategi penjualan Perumahan Multazam Islamic Residence dan transaksi jual beli yang dilakukan *developer* dengan konsumen kemudian dianalisis dengan strategi penjualan dan transaksi jual beli perspektif Islam.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan *marketer* dalam melakukan strategi penjualan perumahan dengan konsep islami yang sesuai dengan perspektif Islam dan transaksi jual beli yang dilakukan *developer* dengan konsumen sesuai dengan akad jual beli perspektif Islam.

1. Menghindari praktik-praktik curang yang pernah dilakukan perusahaan yang dapat merusak nama baik perusahaan di mata konsumen.
 2. Memahami keinginan dan kebutuhan konsumen melalui *research and development* terutama untuk mengetahui selera konsumen yang selalu berubah.
 3. Meng-*counter* praktik-praktik curas perusahaan lain untuk menjatuhkan nama baik perusahaan.
 4. Memiliki kemampuan mengantisipasi strategi perusahaan lain terutama strategi promosi yang begitu gencar dilakukan hampir setiap perusahaan.
 5. Memiliki kemampuan melakukan segmentasi pasar, target, dan memposisikan produk atau jasa di kalangan konsumen.
 6. Semakin maraknya pemalsuan produk yang dilakukan oleh perusahaan lain terutama merek-merek terkenal yang digemari oleh konsumen.
 7. Dalam jangka panjang mampu memuaskan kebutuhan konsumen melalui produk kreatif, inovatif, dan mengikuti perkembangan pasar.
- b. Kemajuan teknologi dalam bidang informasi teknologi juga merupakan era baru dalam kegiatan pemasaran karena proses penjualan tidak lagi dilakukan dalam artian fisik, tetapi sudah dapat dilakukan di dunia maya. Banyak wirausahawan yang memanfaatkan

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.³³

Dalam ketentuan butir III.7.d Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah ditegaskan bahwa pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa yang disepakati oleh bank dan nasabah penyewa selesai.³⁴

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ij rah Muntahiyah Bittaml k* (IMBT), yang dimaksud dengan sewa beli (*al-ij rah al-muntahiyah bi al-taml k*), yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.³⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *Ij rah Muntahiyah Bittaml k* (IMBT) adalah perjanjian sewa-menyewa antara pemberi sewa dan penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh penyewa kepada pemberi sewa, yang mengikat pemberi sewa untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

³³ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31DPbs*; Perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, (Jakarta: Surat Edaran, 2008)

³⁴ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/DPbs*; Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (Jakarta: Surat Edaran, 2008), 16.

³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ij rah Muntahiyah Bittaml k (IMBT)*, (Jakarta: Fatwa DSN-MUI, 2002).

2. Bagian pembiayaan yaitu *finance* dan direktur akan menganalisis berkas-berkas yang sudah diserahkan oleh konsumen, yang bertujuan untuk mengetahui layak atau tidak konsumen tersebut menerima pembiayaan Perumahan Multazam Islamic Residence.
3. Pemohon membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,00, uang tanda jadi tersebut sudah memotong uang muka pembelian Perumahan Multazam Islamic Residence. Untuk pembayaran uang muka perumahan, pembayarannya dapat diangsur sebanyak 10 kali. Uang muka harus dibayar paling lambat 1 minggu sejak tanda jadi. Harga jual sudah termasuk jaringan air, instalasi listrik, dan IMB dan belum termasuk Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pemecahan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun hunian, biaya pembuatan akta jual-beli dihadapan notaris/PPAT dan balik nama sertifikat, biaya balik nama listrik dan telepon, PBB, biaya pengurusan KPR.
4. Pemohon akan melakukan akad IMBT secara langsung dengan direktur sebagai perwakilan pihak Multazam Islamic Residence dan notaris sebagai payung hukumnya. Dalam akad tersebut dijelaskan besarnya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Untuk pembayaran angsuran perumahan dapat dibayarkan melalui rekening bank BCA dan bank Mandiri atas nama PT. Cahaya Mentari Pratama atau dapat membayar angsuran secara *cash* ke kantor PT. Cahaya mentari Pratama atau dapat juga dibayarkan lewat transaksi dengan *virtual account* yang diberikan kepada masing-masing konsumen.

Juli 2018 rumah sudah jadi dan siap untuk ditempati. Pada saat itu, Pak Jono sudah membayar cicilan rumah pada bulan Agustus 2016 – Juli 2018, yaitu sebanyak 24 bulan dan selama 24 bulan itu Pak Jono belum menempati rumah. Maka, nanti pada saat Pak Jono sudah melunasi cicilan rumah hingga 15 tahun, pihak Multazam akan mengembalikan *ujrah* sewa tipe Syukron sebesar Rp. 2.200.917,00/bulan x 24 = Rp. 52.822.008,00.

Sedangkan untuk uang muka yang belum dibayar lunas, maka bulan depan, beliau masih membayar angsuran uang muka. Angsuran uang muka dibayarkan maksimal selama 2 tahun atau 24 bulan. Pada saat rumah sudah jadi, konsumen mulai mengangsur cicilan rumah sebanyak 70% karena 30% dari harga rumah merupakan uang muka.

Pihak Multazam Islamic Residence tidak menerapkan denda terhadap konsumen yang terlambat atau tidak mampu untuk membayar angsuran, tetapi diberikan keluasaan waktu selama 4 bulan dan 1 bulan sebagai masa evaluasi. Alasan diberi keluasaan waktu selama 4 bulan dan 1 bulan bagi konsumen yang terlambat untuk membayar adalah karena pihak Multazam memahami bahwa kemungkinan konsumen sedang ada pemutusan kerja, sehingga konsumen diberikan kesempatan untuk dapat mencari pekerjaan kembali. Jika melebihi waktu yang sudah diberikan, maka objek yang disewa tersebut akan dilelang. Sedangkan dana yang sudah masuk sebagai angsuran tersebut akan dikembalikan kepada konsumen, kecuali uang tanda jadi.²⁸

²⁸ Agil Prastiaji (Karyawan, *Marketing* PT. Cahaya Mentari Pratama), *Wawancara*, Marketing Gallery PT. Cahaya Mentari Pratama, Jl. Raya Rungkut Menanggal Harapan J5 Surabaya, 15 Juni 2016, Jam 13.00 WIB.

yang harus dipenuhi adalah adanya objek kontrak *ij rah* yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)

Alur transaksi jual-beli Perumahan Multazam Islamic Residence ada yang berbeda dengan teori, pada praktiknya disebutkan bahwa pemohon akan melakukan akad IMBT secara langsung. Namun berdasarkan Fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan akad IMBT (*Ij rah Muntahiya Bittaml k*) harus melakukan akad *ij rah* terlebih dahulu. Sedangkan secara praktiknya pihak Multazam langsung menggunakan akad IMBT, tanpa menggunakan akad *ij rah* terlebih dahulu, sedangkan akad IMBT digunakan pada saat masa sewa berakhir dan pemindahan kepemilikan objek tersebut.

Setelah diadakannya perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *ij rah* atau IMBT yang berisi tentang objek sewa, jangka waktu sewa dan *fee* sewa yang diberikan oleh penyewa kepada pemberi sewa, hak opsi penyewa setelah masa sewa berakhir, dan ketentuan lainnya, maka pemberi sewa menyediakan objek sewa dan penyewa menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Sedangkan dalam praktiknya, pihak Multazam baru menyediakan objek sewa untuk dimanfaatkan oleh penyewa sekitar 2 tahun yang akan datang, tetapi selama jangka waktu tersebut, penyewa tetap membayar *fee* sewa kepada penyewa. Namun, pihak Multazam akan mengembalikan *fee* sewa pada akhir masa sewa, penyewa akan menerima *cashback* sesuai tipe perumahan yang disewa

konsumen sedang mengalami masalah *finansial*. Jika melebihi waktu yang sudah diberikan, maka objek yang disewa tersebut akan dilelang. Sedangkan dana yang sudah masuk sebagai angsuran tersebut akan dikembalikan kepada konsumen, kecuali uang tanda jadi. Praktik yang dilakukan oleh pihak Multazam kepada konsumen yang mengalami wanprestasi sudah sesuai, bahwa penyewa wajib memindahkan manfaat atas barang yang disewa sesuai dengan jangka waktu yang tersisa kepada pihak ketiga yang disetujui oleh pemberi sewa.

Pemindahan manfaat sewa tersebut di atas disertai kompensasi pembayaran minimal sebesar *outstanding* kewajiban penyewa kepada pemberi sewa. Pembayaran uang sewa dapat berupa biaya sewa dan cicilan harga objek sewa. Karena itu, apabila terdapat kelebihan dari uang kompensasi setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban penyewa kepada pemberi sewa, maka kelebihan tersebut harus dibayarkan kepada penyewa. Namun hal tersebut sebaiknya dilakukan pada saat objek sewa sudah ada.

Untuk biaya perawatan Perumahan Multazam Islamic Residence yang menanggung adalah *estate management*, yaitu setelah serah terima bangunan selama 100 hari, kemudian selebihnya adalah tanggung jawab dari penyewa. Sebaiknya pihak Multazam tidak memberikan jangka waktu selama 100 hari, tetapi selama objek itu disewakan, dan pihak Multazam sebaiknya memberikan spesifikasi apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak pada saat melakukan akad, seperti yang sudah disebutkan dalam teori

oleh DSN. Namun, PT. Cahaya Mentari Pratama bukanlah perusahaan yang berbasis syariah, yang berbasis syariah adalah salah satu produknya.

Jika dilihat dari kasus seperti ini, maka akad yang kemungkinan lebih baik digunakan dalam transaksi jual-beli Perumahan Multazam Islamic Residence adalah akad *isti n* ' karena barang yang diperjualbelikan belum ada dan harus memesan kepada penjual terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli. Seperti kutipan Keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Isl mi* (di bawah Mukhtamar Islam) tentang KPR dan peran pemerintah (Majalah *Al-Majma' Mukhtamar VI*, Volume 1, hlm. 81). Majelis *Majma' Al-Fiqh Al-Isl mi* menyelenggarakan Mukhtamar ke-6 di Jeddah KSA, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H, bertepatan dengan 14-20 Maret 1990 M.

Skema transaksi jual beli rumah bisa menggunakan akad *isti n* ', jika dianggap sebagai satu keharusan, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk membeli rumah itu sebelum dibangun. Tentu saja setelah ada penjelasan dan rincian tentang bangunan, sehingga tidak memicu kesalah-pahaman. Dan dibolehkan tanpa harus membayar tunai, namun boleh dibayar secara kredit sesuai kesepakatan. Barang yang dibiayai dengan akad pembiayaan *isti n* ' dapat dijadikan agunan pokok dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi jenis barang yang bersangkutan.

B. Saran

1. Saran untuk pihak PT. Cahaya Mentari Pratama

- a. Diharapkan pihak PT. Cahaya Mentari Pratama memberikan kemudahan administrasi kepada konsumen baru hasil dari sistem CSR (*Customer Sales Reward*), karena konsumen lama yang mampu menjual rumah kepada konsumen baru akan diberi bonus.
- b. Diharapkan pihak PT. Cahaya Mentari Pratama menggunakan akad *isti n'* dalam penjualan Perumahan Multazam Islamic Residence selama objeknya belum ada. Tidak menutup kemungkinan jika objek sudah ada, pihak PT. Cahaya Mentari Pratama bisa menggunakan akad IMBT (*Ij rah Muntahiya Bittaml k*) kembali dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada akad IMBT (*Ij rah Muntahiya Bittaml k*), seperti agunan yang dipersyaratkan kepada konsumen diharapkan bukan agunan berupa sertifikat tanah rumah pada Perumahan Multazam Islamic Residence karena rumah masih milik PT. Cahaya Mentari Pratama selama perjanjian sewa masih berlangsung. Pada transaksi IMBT diharapkan pihak PT. Cahaya Mentari Pratama menggunakan akad *ij rah* terlebih dahulu, kemudian pada akhir masa sewa menggunakan akad IMBT (*Ij rah Muntahiya Bittaml k*).
- c. Diharapkan pihak PT. Cahaya Mentari Pratama segera membentuk konsultan syariah supaya penggunaan akad dalam transaksi jual-beli Perumahan Multazam Islamic Residence berjalan sesuai syariat.

- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Swara Prahitta, Hajar. “Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)”. Surabaya: Skripsi. IAIN Sunan Ampel, 2014.
- Yaya, Rizal. et al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Z. Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Zulkarnain. *Ilmu Menjual*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, “KPR dan Peran Pemerintah – Keputusan Majma’ Al-fiqh Al-islami (di bawah OKI : Organisasi Konferensi Islam ”, dalam <http://pengusahamuslim.com/kpr-dan-peran-1811/> (26 November 2015).
- Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/DPbS; Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (Jakarta: Surat Edaran, 2008), 16.
- Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31DPbs; Perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, (Jakarta: Surat Edaran, 2008)
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istina’, (Jakarta: Fatwa DSN-MUI, 2000).
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), (Jakarta: Fatwa DSN-MUI, 2002).
- Kitab Shahih Bukhari Pasal 2 No. 2240 Hal. 534 dan Kitab Shahih Muslim Bab As-sa’ilmu No. 1604 Hal. 753.

